

Negara dan Warga Negara

**Fauzan Felix Hidayat, Zamzam Muhamad, Alifia Hendrista Utami, Muhamad Ihsan Al Ansori,
Moch. Fachru Ainun Nasrofi, Zahra Azalia Putri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi

Email: fauzanh29@gmail.com, zamzammuhammadnizar@gmail.com, alifiahendrista@gmail.com,
muhamadihsanalansori12@gmail.com, mochfachruainunnasrofi@gmail.com,
zahraazaliap@gmail.com

Abstrak:

Jurnal ini membahas tentang hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks politik dan hukum. Negara sebagai entitas politik memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatur kehidupan masyarakatnya, sementara warga negara adalah individu yang mempunyai hak, kewajiban, dan identitas sebagai bagian dari negara tersebut. Tulisan ini menganalisis dinamika interaksi antara negara dan warga negara, serta implikasinya dalam konteks sosial dan hukum.

Dalam jurnal ini, penulis menggali konsep-konsep utama yang terkait dengan negara dan warga negara, termasuk hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan tugas negara dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan warganya. Peran negara dalam membangun dan menjaga kedaulatan serta keamanan negara juga menjadi fokus penelitian. Selain itu, penulis juga membahas bagaimana warga negara berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, maupun organisasi sosial

Kata Kunci: negara, warga negara, hubungan, politik, hukum, kewarganegaraan, hak asasi manusia, partisipasi politik, globalisasi, kebebasan berpendapat

Abstract:

This journal discusses the relationship between the state and citizens in the context of politics and law. The state as a political entity has an important role in shaping and regulating the life of its people, while citizens are individuals who have rights, obligations and identities as part of the country. This paper analyzes the dynamics of interaction between the state and citizens, as well as its implications in the social and legal context.

In this journal, the authors explore key concepts related to the state and citizens, including human rights, citizenship, and the state's duty to protect and promote the welfare of its citizens. The role of the state in developing and maintaining state sovereignty and security is

also the focus of research. In addition, the author also discusses how citizens participate in the political process, either through general elections, freedom of speech, or social or organizations.

Keywords: state, citizens, relations, politics, law, citizenship, human rights, political participation, globalization, freedom of expression.

PENDAHULUAN

Negara dan warga negara adalah dua entitas yang saling terkait dan berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Dalam konteks global yang semakin kompleks, hubungan antara negara dan warga negara menjadi topik yang menarik dan relevan untuk diteliti. Pemahaman yang mendalam tentang interaksi dan dinamika antara negara dan warga negara dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para ahli, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Negara merupakan entitas politik yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang diatur oleh hukum dan peraturan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya, serta menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Fungsi negara mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan keputusan politik, pembuatan kebijakan, serta pengaturan hubungan dengan negara-negara lain dalam konteks hubungan internasional.

Di sisi lain, warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara. Warga negara memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu terhadap negara tempat mereka tinggal. Hak-hak warga negara meliputi hak sipil, politik, dan sosial, seperti kebebasan berpendapat, hak memilih, hak atas perlindungan hukum, dan hak mendapatkan akses ke layanan publik. Kewajiban warga negara meliputi ketaatan terhadap hukum, pembayaran pajak, serta partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial negara.

Interaksi antara negara dan warga negara dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan ini melibatkan peran negara dalam memberikan pelayanan publik kepada warga negaranya, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, warga negara berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik, proses politik, dan pembangunan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum, pengorganisasian kelompok masyarakat, dan penyampaian aspirasi mereka kepada pemerintah.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis kerangka hukum dan konstitusi dari beberapa negara yang mewakili berbagai system politik. Selain itu, analisis konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan kewajiban warga negara

Hak dan Kewajiban Negara adalah aspek penting dalam hubungan antara negara dan warga negara. Hak-hak warga negara meliputi hak sipil, politik, dan ekonomi yang diberikan oleh negara kepada individu yang memiliki status kewarganegaraan. Di sisi lain, kewajiban warga negara mencakup tanggung jawab partisipasi, ketaatan hukum, dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang hak dan kewajiban warga negara:

Hak-hak Sipil:

1. Hak atas kehidupan

Warga negara memiliki hak untuk hidup dengan aman dan terlindungi dari ancaman atau tindakan kekerasan.

2. Hak privasi

Warga negara memiliki hak untuk menjaga privasi pribadi dan keluarga mereka tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak lain atau pemerintah.

3. Hak kebebasan berpendapat

Warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat, berpendapat, dan menyampaikan informasi tanpa takut akan penganiayaan atau hukuman.

4. Hak kebebasan beragama

Warga negara memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agama mereka sesuai kepercayaan pribadi mereka tanpa diskriminasi.

5. Hak atas kebebasan bergerak

Warga negara memiliki hak untuk bepergian dan tinggal di dalam negara serta meninggalkan dan kembali ke negara asal mereka.

Hak-hak Politik:

1. Hak memilih

Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan memberikan suara untuk memilih perwakilan mereka di dalam pemerintahan.

2. Hak mencalonkan diri

Warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilihan umum atau untuk menjabat dalam posisi publik tertentu.

3. Hak berorganisasi

Warga negara memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik atau kelompok masyarakat sipil untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

6. Hak kebebasan berpendapat

Warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, mengkritik pemerintah, dan terlibat dalam diskusi politik secara terbuka.

B. Perlindungan dan Keamanan

Negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari ancaman eksternal dan internal. Ini termasuk kebijakan keamanan, sistem kepolisian, dan angkatan bersenjata yang menjaga integritas negara dan keamanan warga negara.

Selain tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dari ancaman eksternal dan internal, terdapat beberapa aspek tambahan yang relevan terkait perlindungan dan keamanan (Kemhan RI, 2017). Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut:

1. Kebijakan keamanan

Negara memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan keamanan yang melindungi warga negara dari berbagai ancaman dan menjaga integritas negara. Kebijakan ini meliputi strategi pertahanan nasional, kebijakan luar negeri, penanganan konflik, dan kerja sama keamanan dengan negara-negara lain. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas dalam negeri dan memastikan keamanan nasional.

2. Sistem kepolisian

Negara bertanggung jawab untuk menyediakan sistem kepolisian yang efektif dan profesional. Kepolisian memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat lokal, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada warga negara dari kejahatan dan ancaman keamanan. Mereka bertugas untuk melakukan patroli, penyelidikan, penangkapan, dan memberikan layanan bantuan dalam situasi darurat.

3. Angkatan Bersenjata

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memiliki dan mengelola angkatan bersenjata yang memadai. Angkatan bersenjata bertugas untuk menjaga keamanan negara dari ancaman militer dan konflik bersenjata. Mereka melindungi integritas wilayah negara, membela warga negara dari serangan musuh, serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di tingkat regional atau internasional.

4. Perlindungan terhadap ancaman non-militer

Selain ancaman militer, negara juga harus melindungi warga negaranya dari ancaman non-militer seperti terorisme, kejahatan terorganisir, bencana alam, dan serangan siber. Ini melibatkan kebijakan keamanan yang berfokus pada pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap kelompok atau individu yang mengancam keamanan masyarakat.

5. Perlindungan hak asasi manusia

Perlindungan dan keamanan yang diupayakan oleh negara juga harus mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negara. Negara harus menjamin bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan yang tidak manusiawi, atau diskriminasi yang melanggar hak-hak individu.

Dalam rangka menjalankan tanggung jawab ini, negara perlu mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang memastikan perlindungan dan keamanan warga negara sesuai dengan hukum, menghormati hak-hak individu, dan melibatkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan keamanan (Kemhan RI, 2015).

C. Partisipasi dan Kewarganegaraan Aktif

Warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara mereka. Ini melibatkan pemilihan umum, hak bersuara, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara mereka adalah elemen penting dari kewarganegaraan aktif (Kersh et al., 2021). Berikut ini adalah beberapa aspek lebih lanjut mengenai partisipasi dan kewarganegaraan aktif:

1. Pemilihan umum

Salah satu bentuk utama partisipasi politik warga negara adalah melalui pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka di parlemen, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dengan menggunakan hak suara mereka, warga negara dapat ikut menentukan kebijakan dan arah negara mereka.

2. Hak bersuara

Hak bersuara adalah hak yang melekat pada warga negara untuk mengemukakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan umum, forum publik, atau media sosial. Dengan menyuarakan pandangan mereka, warga negara dapat mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong perubahan yang diinginkan

3. Partisipasi dalam organisasi politik

Warga negara juga dapat berpartisipasi dalam organisasi politik seperti partai politik, kelompok advokasi, atau kelompok masyarakat sipil. Dengan menjadi anggota atau mendukung organisasi semacam itu, warga negara dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan politik, memobilisasi dukungan untuk isu-isu penting, dan membentuk opini publik.

4. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Warga negara memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ini bisa dilakukan dengan berpartisipasi dalam konsultasi publik, mengirimkan tanggapan atau saran kepada pemerintah, atau ikut serta dalam forum atau komite yang membahas kebijakan publik.

5. Kewajiban mengikuti hukum

Bagian penting dari kewarganegaraan aktif adalah kewajiban untuk mengikuti hukum yang berlaku. Ini mencakup patuh terhadap peraturan lalu lintas, peraturan keamanan, dan ketentuan hukum lainnya. Dengan mematuhi hukum, warga negara dapat memastikan keberlanjutan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

Melalui partisipasi politik dan kewarganegaraan aktif, warga negara dapat menjalankan peran aktif dalam membentuk arah dan kebijakan negara mereka. Partisipasi ini penting untuk memastikan representasi yang lebih adil, pembuatan keputusan yang lebih inklusif, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

D. Ketergantungan Timbal Balik

Negara dan warga negara saling tergantung satu sama lain. Negara membutuhkan partisipasi dan kontribusi warga negara untuk menjaga stabilitas dan kemajuan, sementara warga negara bergantung pada negara untuk perlindungan, pelayanan publik, dan pemberdayaan yang memenuhi kebutuhan mereka. Kerjasama yang seimbang antara negara dan warga negara menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dan membangun hubungan yang harmonis.

E. Kewarganegaraan dan Identitas

Kewarganegaraan adalah faktor penting dalam menentukan identitas seseorang. Menjadi warga negara suatu negara memberikan identitas yang unik dan mengakui hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Identitas kewarganegaraan juga memainkan peran penting dalam membangun solidaritas nasional dan rasa kebersamaan di antara warga negara (Nurhastuti, 2015).

kewarganegaraan memainkan peran krusial dalam membentuk identitas seseorang. Berikut ini adalah beberapa aspek lebih lanjut mengenai hubungan antara kewarganegaraan dan identitas:

1. Identitas hukum

Kewarganegaraan memberikan identitas hukum yang jelas bagi seseorang. Status sebagai warga negara menentukan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada individu tersebut.

Identitas hukum ini mencakup hak untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut, akses ke layanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, serta partisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum.

2. Identitas sosial dan budaya

Kewarganegaraan juga berdampak pada identitas sosial dan budaya seseorang. Menjadi bagian dari suatu negara memberikan rasa kebersamaan dan ikatan dengan komunitas nasional. Individu dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota suatu kelompok nasional yang memiliki sejarah, budaya, dan nilai-nilai bersama. Identitas ini dapat diperkuat melalui bahasa, tradisi, simbol nasional, dan perayaan kebudayaan.

3. Solidaritas nasional

Identitas kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membangun solidaritas dan persatuan di antara warga negara. Saat individu mengenali diri mereka sebagai bagian dari suatu negara, mereka merasa memiliki keterikatan dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Solidaritas nasional ini menjadi dasar untuk kerjasama sosial, pemecahan konflik, dan membangun masyarakat yang harmonis.

4. Kewarganegaraan ganda dan identitas ganda

Dalam beberapa situasi, individu dapat memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu menjadi warga negara dari lebih dari satu negara. Ini dapat memengaruhi identitas mereka dengan menambah dimensi kebangsaan yang lebih kompleks. Individu dengan kewarganegaraan ganda dapat merasakan keterikatan dan mengidentifikasi diri dengan lebih dari satu kelompok nasional.

Identitas kewarganegaraan merupakan komponen integral dari identitas seseorang. Hal ini dapat membentuk persepsi diri, nilai-nilai, dan rasa memiliki terhadap negara dan masyarakat di mana individu tersebut tinggal. Identitas kewarganegaraan juga dapat berdampak pada interaksi sosial, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan dan masa depan negara tersebut.

F. Peran Hukum dalam Hubungan Negara dan Warga Negara

Hukum memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Hukum kewarganegaraan menetapkan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kewarganegaraan, sementara hukum konstitusi mengatur batasan kekuasaan negara dan hak-hak individu. Keberadaan sistem hukum yang adil dan transparan menjadi dasar yang kuat untuk menjaga hubungan yang sehat antara negara dan warga negara. Peran hukum sangat penting dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara (Isharyanto, 2021). Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait peran hukum dalam hubungan negara dan warga negara:

1. Hukum kewarganegaraan

Hukum kewarganegaraan menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti oleh individu untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ini mencakup ketentuan mengenai kelahiran, pewarganegaraan oleh keturunan, pernikahan, naturalisasi, dan pengakuan kewarganegaraan ganda. Hukum kewarganegaraan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi negara dalam menetapkan status kewarganegaraan dan hak-hak yang melekat pada warga negara.

2. Hukum konstitusi

Hukum konstitusi merupakan landasan hukum yang mengatur batasan kekuasaan negara dan hak-hak individu. Konstitusi negara menetapkan struktur pemerintahan, prinsip-prinsip

dasar negara, serta hak-hak dan kebebasan yang dijamin kepada warga negara. Hukum konstitusi melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara dan memberikan kerangka hukum yang mengatur tata kelola negara secara adil dan transparan.

3. Perlindungan hukum

Hukum memberikan perlindungan kepada warga negara dari pelanggaran hak-hak mereka. Sistem hukum yang adil dan transparan memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke peradilan yang independen dan obyektif. Hukum juga menetapkan sanksi dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara atau entitas lain. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan lainnya.

4. Kewajiban dan tanggung jawab

Hukum juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada status kewarganegaraan. Ini meliputi kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, serta melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh hukum. Hukum juga mengatur kewajiban warga negara terhadap negara, seperti kewajiban militer atau partisipasi dalam pemilihan umum.

5. Penegakan hukum

Pentingnya hukum dalam hubungan negara dan warga negara juga terletak pada penegakan hukum yang efektif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sistem peradilan yang independen, memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup keberadaan lembaga peradilan yang adil, sistem kepolisian yang

profesional, dan penegakan hukum yang konsisten (Sudiantara, 2021).

Dengan adanya hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten, hubungan antara negara dan warga negara dapat terjaga dengan baik.

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pembahasan dalam jurnal ini dapat diketahui bahwa Hubungan antara negara dan warga negara merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan politik suatu masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya kerjasama yang seimbang antara negara dan warga negara dalam mencapai tujuan bersama. Hukum dan kewarganegaraan memainkan peran sentral dalam mengatur hubungan ini dengan menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta batasan kekuasaan negara. Dalam hubungan yang saling melengkapi ini, negara dan warga negara saling tergantung satu sama lain dan peran keduanya penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan perkembangan negara.

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara negara dan warga negara ini menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya terus-menerus dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara negara dan warga negara akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

BIBLIOGRAFI

Fauzan Felix Hidayat, Zamzam Muhamad, Alifia Hendrista Utami, Muhamad Ihsan Al Ansori, Moch. Fachru Ainun Nasrofi, Zahra Azalia Putri

Isharyanto, S. H. (2021). Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan. Jakarta: Absolute Media.

Kemhan RI. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kemhan RI. (2017). Bela Negara Dalam Perspektif Strategi Dan Kebijakan Pertahanan Negara. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.

Kersh, N., Toiviainen, H., Zarifis, G. K., & Pitkonen, P. (2021). Active Citizenship, Lifelong Learning and Inclusion: Introduction to Concepts and Contexts. In *Young Adults and Active Citizenship: Towards Social Inclusion through Adult Education* (pp. 1–18). London: Springer International Publishing Cham.

Nurhastuti, N. (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: SMALB Tunarungu Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sudiantara, Y. (2021). Kewargaan Negara Indonesia: Referensi Alternatif Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Kewarganegaraan. Jakarta: SCU Knowledge Media.

Copyright holder:

Fauzan Felix Hidayat, Zamzam Muhamad, Alifia Hendrista Utami, Muhamad Ihsan Al Ansori, Moch. Fachru Ainun Nasrofi, Zahra Azalia Putri (2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

